



**LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
“OPTIMALISASI PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN UNTUK KEGIATAN
PKKPR PADA KANTOR PERTANAHAN
KOTA BATAM”**

Disusun Oleh:

NAMA : Amdani, S.H.,M.Kn
NIP : 197104021994031002
**JABATAN : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor
Pertanahan Kota Batam**

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I KELOMPOK III

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TAHUN 2023



LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Implementasi Aksi Perubahan dengan judul:

OPTIMALISASI PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN UNTUK KEGIATAN PKKPR PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 Gelombang 1 Angkatan 1:

Nama : Amdani, S.H.,M.Kn
NIP : 197104021994031002
Jabatan : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Batam

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Implementasi Aksi Perubahan, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023.

Menyetujui:

Bogor, 7 Agustus 2023

COACH



Sukanto, S.T., M.P.W.K.
NIP. 198105182009031005

Batam, Agustus 2023

MENTOR



Ditandatangani Secara Elektronik

Deni Prasetyo, S.E.,M.M.
NIP. 197601101998031002



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	3
BAB I Pendahuluan	4
1. Rencana Aksi Perubahan	4
1.1 Analisa Masalah	5
1.2 Strategi Penyelesaian Masalah	6
BAB II Deskripsi Proses Kepemimpinan	8
2.1 Membangun Integritas	9
2.2 Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan TI)	10
2.3 Pengelolaan Tim	13
BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	16
3.1 Capaian Dalam Perbaikan System Pelayanan	16
3.2 Manfaat Aksi Perubahan	18
3.3 Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan.....	19
BAB IV KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	21
4.1 Pemanfaatan Mata Pelatihan Pilihan Dalam Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan	21
BAB V DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	24
5.1 Penerapan Strategi Komunikasi.....	24
BAB VI KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN.....	27
6.1 Perencanaan Keberlanjutan Inovasi.....	27
BAB VII PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	28
Berikut Hasil Identifikasi Pengembangan Potensi Diri Dalam Aksi Perubahan dengan kriteria dan penilaian tertentu	29
BAB VIII PENUTUP	35
5.1 Kesimpulan.....	35
5.2 Rekomendasi dan Rencana Kegiatan Target Jangka Panjang	35
BAB IX LAMPIRAN	36

BAB I

Pendahuluan

1. Rencana Aksi Perubahan

Pelatihan kepemimpinan untuk pengawas berasal dari kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan manajemen di lingkungan kerja. Pengawas memiliki peran penting dalam mengelola tugas dan tanggung jawab mereka, baik dalam konteks sektor publik maupun swasta. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi dan memimpin staff mereka, serta memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab mereka dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukan keterampilan kepemimpinan dan manajemen yang efektif untuk pengawas agar mereka dapat mengelola tim dan tugas mereka dengan baik, khususnya pada pelayanan di Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kota Batam terkait pelayanan pertimbangan teknis pertanahan. Dalam Pelaksanaan pelayanan pertimbangan teknis ini, ternyata terdapat permasalahan yakni kelebihan target pada pelaksanaan Pertimbangan Teknis dengan ketersediaan SDM yang ada, sehingga proses penyelesaian pelayanan pertimbangan teknis pada Kantor Pertanahan Kota Batam terbilang lambat. Oleh karena itu, penulis mengajukan sebuah makalah dengan judul “Optimalisasi Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan PKKPR Pada Kantor Pertanahan Kota Batam”.

Aktualisasi aksi perubahan terkait optimalisasi pertimbangan teknis pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Batam memiliki tujuan dari jangka pendek yaitu terciptanya alur yang sesuai dalam pelaksanaan pelayanan pertimbangan teknis bagi staff yang membidangi pelayanan ini. Tujuan jangka menengah dari aktualisasi ini adalah staff yang tergabung dalam tim pertimbangan teknis sudah paham dan menerapkan teknik penyelesaian pelayanan dengan tetap memperhatikan alur maupun ketentuan yang telah dibuat guna menghindari kelebihan target yang diterima per individu sehingga mengurangi keterlambatan penyelesaian pertimbangan teknis pertanahan. Sedangkan tujuan jangka Panjang dari aktualisasi ini adalah system atau pengaturan tabel yang telah dibuat mengenai pengaturan waktu, jadwal, serta staff yang dibutuhkan dalam penyelesaian pelayanan pertimbangan teknis ini. Serta terciptanya nilai tambah bagi Kantor Pertanahan Kota Batam, dari sebelumnya belum ada tabel penyesuaian dalam pelaksanaan pertimbangan teknis pertanahan untuk pelaksanaan kegiatan agar tidak melebihi kapasitas staff yang tersedia sehingga menjadi lebih terkoordinasi dan terintegrasi.

Implementasi aksi perubahan ini, dilaksanakan selama 10 minggu yang dimulai sejak awal Juni dan berakhir pada awal bulan Agustus 2023. Harapannya keseluruhan kegiatan aktualisasi

yang telah Penulis realisasikan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, khususnya pada Seksi Penataan Dan Pemberdayaan di Kantor Pertanahan Kota Batam. Adapun ruang lingkup aksi perubahan ini meliputi area lingkungan kerja yakni Kantor Pertanahan Kota Batam yang melibatkan mulai dari pimpinan dalam hal ini Yaitu Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Staff seksi 3 dan pihak eksternal (Pemerintah Kota Batam yaitu Dinas CKTR, Forum Penataan Ruang dan masyarakat sebagai pemohon.

1.1 Analisa Masalah

Pelayanan Pertimbangan Teknis Pelayanan dapat mendukung kegiatan perizinan PKKPR yang sudah berlangsung di Batam, Pertimbangan Teknis ini memberikan gambaran dan analisa terkait kondisi lapang dan kesesuaian dengan rencana tata ruang Kota Batam. Permohonan yang masuk per bulan bisa lebih dari 40 permohonan, sehingga perlu dilakukan optimalisasi sehingga pelayanan berjalan dengan baik. Berdasarkan Petunjuk Teknis Pertimbangan Teknis Pertanahan atau PTP, idealnya pelayanan pertimbangan teknis pertanahan dilakukan dalam waktu 10 hari kerja jika tidak ada kendala. Akan tetapi, alam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang bersifat teknis dan non teknis seperti:

1. Kurangnya pengetahuan pemohon dalam proses perizinan PKKPR, hal ini meliputi kesalahan input data di sistem OSS (polygon/textual, ketidaktahuan terkait alur dan instansi mana yang saja yang berperan dalam proses PKKPR di Kota Batam;
2. Lamanya pemohon dalam menyiapkan persyaratan dokumen pertimbangan teknis;

Analisis Pemilihan masalah dilakukan menggunakan metode analisis Urgency, Seriousness, dan Growth (USG) adalah kerangka kerja yang digunakan dalam manajemen produk untuk membantu memprioritaskan tindakan yang perlu dilakukan. Dari berbagai isu yang muncul, isu prioritas yang diidentifikasi adalah kurang optimalnya layanan pertimbangan teknis pertanahan. Untuk mengatasi isu tersebut, beberapa langkah strategis dapat diambil yaitu:

1. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pelayanan dan aplikasi: Memanfaatkan aplikasi pertanahan yang telah tersedia, seperti penggunaan Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan dalam Pemantauan Pelayanan Pertanahan, penggunaan excel sebagai monitoring status berkas pelayanan pertimbangan teknis pertanahan, penggunaan aplikasi Spreadsheet dalam pembuatan lembar kendali, penggunaan Cloud Storage dalam inventarisasi dokumen PTP dan memanfaatkan aplikasi email dalam komunikasi PTP antar instansi;

2. Optimalisasi kinerja pegawai : Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan *Time Management, Job Management*, pelatihan peningkatan skill baik secara *online* maupun *offline* dan pemberian pelatihan terkait penggunaan teknologi digital.

Implementasi langkah-langkah ini memerlukan peran dari stakeholder internal seperti Seksi Survey dan Pemetaan serta Seksi Pendaftaran Hak dan Perubahan Hak. Stakeholder eksternal juga perlu terlibat, seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Dinas Pertanahan Kota Batam sebagai anggota forum penataan ruang. Dalam memetakan stakeholder dan implementasi langkah-langkah ini, perlu memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Pelatihan untuk pegawai dan dukungan dari pimpinan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan inovasi dalam pelayanan. Pengalokasian anggaran yang tepat juga penting untuk memastikan kelancaran implementasi. Sarana prasarana seperti laptop, internet, printer, dan aplikasi pendukung lainnya harus disiapkan dengan baik. Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan layanan pertimbangan teknis pertanahan dapat dioptimalkan, serta adanya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kemudahan bagi pemohon. Transformasi informasi yang disampaikan melalui digital maupun non digital dalam pelayanan pertanahan akan mendukung komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan ekonomi melalui sektor pertanahan. Namun, perlu diingat bahwa langkah-langkah ini harus diikuti dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya. Semua pihak yang terlibat harus saling berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik agar tujuan dalam optimalisasi pelayanan pertimbangan teknis pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Batam dapat dilakukan secara maksimal, sehingga pelayanan pertanahan yang diberikan kepada masyarakat juga cepat dan masyarakat merasa puas.

1.2 Strategi Penyelesaian Masalah

a. Inovasi

Salah satu terobosan yang diusulkan adalah dengan menerapkan system SMARTER yaitu Specific (Spesifik), Measurable (Mengukur), Achievable (Terjangkau), Relevant (Relevan), Time-bound (Berbatas waktu), Evaluate (Mengevaluasi), dan Revise (Merevisi). Dengan menerapkan konsep SMARTER dalam analisa pelayanan, organisasi dapat memiliki panduan yang jelas untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan mereka secara efektif dan efisien. Selain menggunakan terobosan, dalam implementasi aksi perubahan ini, penulis juga menentukan inovasi, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas,

kualitas, atau memberikan keuntungan kompetitif dalam suatu lingkungan bisnis atau dalam kehidupan sehari-hari. Adapun inovasi yang dilakukan dalam penerapan aksi perubahan ini ialah dengan memanfaatkan Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan dalam Pemantauan Pelayanan Pertanahan, penggunaan aplikasi Excel Sebagai Monitoring Status Berkas Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan, Penggunaan Aplikasi Spreadsheet dalam Pembuatan Lembar Kendali, Penggunaan Cloud Storage dalam Inventarisasi Dokumen PTP dan Penggunaan Email dalam Komunikasi Dokumen PTP antar Instansi. Rencana Aksi perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan pertimbangan teknis, agar dapat dilaksanakan lebih efisien dan lebih cepat.

BAB II

Deskripsi Proses Kepemimpinan

Terdapat beberapa pengertian mengenai kepemimpinan, diantaranya :

- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau memengaruhi;
- Menurut Civitas akademika di Amerika Serikat menyebutkan pengertian kepemimpinan sebagai sebuah proses pengaruh sosial yang di dalamnya seseorang dapat melibatkan bantuan dan dukungan selainnya dalam usaha mencapai suatu tugas bersama;
- Menurut Weschler dan Massarik (1961). Pengertian kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, yang dijalankan dalam situasi tertentu, dan diarahkan melalui proses komunikasi, untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kepemimpinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kepemimpinan setidaknya terdapat komponen pemimpin, proses menggerakkan orang, adanya pengikut, tujuan dan organisasi. Setidaknya terdapat sejumlah ciri-ciri dan nilai yang muncul dari seorang pemimpin yang memiliki hati yang melayani, yaitu tujuan utama seorang pemimpin adalah melayani kepentingan mereka yang dipimpinnya. Orientasinya adalah bukan untuk kepentingan diri pribadi maupun golongan tapi justru kepentingan publik yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang efektif dimulai dengan visi yang jelas. Visi ini merupakan sebuah daya atau kekuatan untuk melakukan perubahan yang mendorong terjadinya proses kreatifitas melalui integrasi maupun sinergi berbagai keahlian dari orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Kepemimpinan yang melayani sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Motto Kementerian ATR/BPN, yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya.

Sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik ATR/BPN dituntut harus bisa melaksanakan pelayanan publik secara efektif dan efisien ditengah lingkungan masyarakat yang dinamis. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Perbaikan layanan pertanahan merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi

agar sesuai dengan tujuan dan standar operasional yang diharapkan. Perbaikan pelayanan juga merupakan salah satu tujuan dari pelayanan publik yaitu “Berusaha memuaskan pengguna layanan, sesuai dengan yang diinginkan mereka”. Salah satu perbaikan layanan pertanahan yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengoptimalkan kinerja staff dan pemanfaatan secara maksimal aplikasi digital dalam pelaksanaan pelayanan pertimbangan teknis pertanahan. Dengan harapan dapat menghindari lamanya proses pertimbangan teknis.

2.1 Membangun Integritas

Menurut Henry Cloud, ketika berbicara mengenai integritas, maka tidak akan terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh dan terpadu di setiap bagian diri yang berlainan, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Etika dan integritas yang baik akan menciptakan pemerintahan yang baik (good public governance). Pemerintahan yang baik ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terhadap warganya. Perbaikan layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public sehingga menjadi lebih mudah dan efisien. Implementasi aksi perubahan memerlukan komitmen bersama seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Batam. Komitmen bersama ini dapat diwujudkan dengan membangun integritas dalam pelaksanaan aksi perubahan, terutama bagi Tim Aksi Perubahan. Membangun integritas ini dimulai dengan memohon arahan dan persetujuan Kepala Kantor Pertanahan selaku mentor terkait aksi perubahan yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kota Batam. Mentor sebagai pimpinan tertinggi di Kantor Pertanahan Kota Batam memiliki pengaruh dan peranan yang sangat besar dalam mendukung terlaksananya aksi perubahan ini. Dengan demikian, diperlukan dukungan penuh dalam pelaksanaannya dan kemudian dukungan tersebut disampaikan dalam lingkup dalam Kantor Pertanahan Kota Batam.



Setelah memohon arahan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, selanjutnya adalah membangun integritas di internal seksi penataan dan pemberdayaan. Sesuai dengan tugas di Seksi Penataan dan Pemberdayaan yaitu Penatagunaan tanah yang salah satunya adalah menyelenggarakan pelayanan pertimbangan teknis petanahan.



Tujuan dari rapat internal ini adalah untuk menjelaskan tentang aksi perubahan yang akan dilakukan, pelaksanaan aksi perubahan, tujuan yang akan dicapai, dan membangun tim efektif aksi perubahan.

2.2 Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan TI)

Budaya pelayanan memiliki peran penting dalam organisasi. Menurut Ueno (2012), ada beberapa alasan yang membuat budaya pelayanan menjadi menjadi faktor penting. Pertama, budaya yang kuat dalam pelayanan akan mengarahkan perilaku karyawan secara konsisten dalam melayani pelanggan. Kedua, budaya pelayanan merupakan prasyarat sukses untuk membangun organisasi yang berorientasi pada pelanggan. Ketiga, manajemen tidak mampu mengawasi semua karyawan sehingga budaya pelayanan diharapkan mampu mempengaruhi dan memastikan ketepatan perilaku karyawan dalam pelayanan. Pelayanan publik yang baik dihasilkan dari budaya pelayanan yang diciptakan secara sadar. Tanpa kehadiran budaya pelayanan yang unggul, pelayanan publik menjadi tidak berkualitas dan tidak konsisten. Semua janji pelayanan, slogan pelayanan, sosialisasi pelayanan, semangat pelayanan akan menjadi sia-sia jika semua itu tidak dibangun melalui budaya organisasi yang kuat. Untuk bisa melayani hak masyarakat dengan baik, maka setiap individu pelayan publik wajib bisa berinteraksi secara profesional dalam pelayanan yang diberikan.

Salah satu pelayanan pertanahan yang terdapat di seksi penataan dan pemberdayaan adalah pertimbangan teknis pertanahan dan layanan peta analisis penatagunaan tanah. Untuk

meningkatkan kualitas pelayanan yaitu harus dibangun budaya pelayanan yang memudahkan, terjangkau, efisien dan bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Sesuai dengan motto Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional “semangat melayani, professional dan terpercaya”. Untuk mengelola budaya pelayanan dilakukan identifikasi permasalahan yang ada dan megupayakan solusinya .”. Untuk mengelola budaya pelayanan dilakukan rapat internal di seksi penataan dan pemberdayaan dengan agenda rapat :

- identifikasi permasalahan yang ada dan megupayakan solusinya .
- Inventarisasi berkas yang masuk, yang sudah selesai dan belum selesai;
- Kendala dalam melaksanakan pelayanan;
- Pembuatan jadwal secara teratur dalam penyelesaian pertimbangan teknis pertanahan bagi setiap staff



Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada gagasan kreatif terpilih gagasan “Optimalisasi Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan PKKPR Pada Kantor Pertanahan Kota Batam”.

Dimana teknologi digunakan untuk mempermudah layanan agar layanan dapat digunakan dimana saja secara efektif dan efisien. Dengan adanya inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi ini, banyak dampak positif yang timbul yaitu: Pertama, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik memberikan kemudahan kepada pengguna layanan. Masyarakat tidak harus datang ke instansi pemerintah sebagai pemberi layanan, cukup dengan mengakses halaman yang sudah dikelola oleh pemerintah, baik website atau media sosial, masyarakat sudah bisa mengetahui informasi dasar mengenai layanan yang diberikan, serta mengisi form aplikasi yang telah disediakan. Kedua, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan informasi yang disajikan secara

terbuka melalui teknologi informasi, masyarakat mudah mengetahui SOP, persyaratan, biaya dan jangka waktu yang dibutuhkan. Hal ini dapat mencegah terjadinya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, pungli dan sebagainya.

Transformasi digital dalam pelayanan pertimbangan teknis pertanahan dan peta analisis penggunaan tanah diharapkan untuk menghadirkan pelayanan public yang beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, mewujudkan Pelayanan public berbasis elektronik (e service) dan berbasis teknologi informasi. Perbaikan layanan ini merupakan inovasi proses yaitu perbaikan system tata laksana, inovasi metode yaitu dari cara konvensional ke digital, inovasi konseptual yaitu dengan memanfaatkan teknologi sehingga masyarakat bisa melakukan pendaftaran di mana saja tanpa harus datang ke kantor pertanahan, inovasi teknologi yaitu dengan memanfaatkan teknologi sehingga dapat memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat dan inovasi pengembangan sumber daya manusia yaitu untuk menciptakan sdm yang berkualitas dan mumpuni. Selain pengelolaan budaya pelayanan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi, dalam aktualisasi aksi perubahan ini juga diperlukan Strategi dalam Optimalisasi Pelayanan PTP dirangkum dalam tabel di bawah ini;

Siapa Yang Terdampak Aksi Perubahan	Apa Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan
1. Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan sesuai dengan SK Tim Pertimbangan Teknis	1. Memahami setiap masalah karena kekurangan sistem yang telah ada dalam pelayanan PTP	1. Bimtek, E-elearning, diskusi, sharing terkait Pelayanan PTP
1. Tim Pelaksana Tim Pertimbangan Teknis / Tim Efektif (Koordinator, Analis PGT dan PPNPN)	2. Memiliki background yang sesuai dengan bidang pekerjaan masing- masing.	2. Bimtek, E-elearning, diskusi, sharing terkait Pelayanan PTP
2. Pemohon Pelayanan PTP, karena mendapatkan pelayanan yang prima	3. Pemohon Pahami alur Pelayanan PTP dan dokumen permohonan yang dibutuhkan agar efektif dan efisien	3. Edukasi, sosialisasi dan pro aktif dalam mencari informasi terkait pelayanan PTP

3. Dinas Terkait seperti Dinas CKTR, PTSP, Pusat dan FPR (Mitra Kerja PKKPR)	4. Mampu bekerja sama secara efektif dan efisien antar instansi (kelengkapan data pelayanan PTP)	4. Team building, komunikasi yang baik dengan memanfaatkan teknologi dengan mitra kerja PKKPR
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 1: Strategi dalam Optimalisasi Pelayanan PTP

2.3 Pengelolaan Tim

Tim efektif dapat diartikan sebagai tim yang berhasil mencapai tujuannya (teams that are able to achieve their purpose). Dalam sebuah tim efektif, seluruh komponen tim bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing yang ditujukan semata-mata untuk meraih tujuan tim yang merupakan tujuan bersama. Ada rasa memiliki/taking ownership terhadap tujuan tim tersebut dari setiap anggota tim. Semua komponen tim merasa memiliki tujuan tim dan dengan rasa ini maka lahirlah apa yang disebut sebagai tanggung jawab dan kerelaan untuk berkorban dalam mencapai tujuan bersama tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Adapun visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk mendukung tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Kemudian misinya adalah:

1. Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia.

Berdasarkan visi dan misi diatas tujuan dari aktualisasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan kementerian Agraria dan Tata Ruang, khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus. Tujuan dari aktualisasi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu tujuan jangka Pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang.

1. Tujuan dari jangka pendek : yaitu terciptanya alur yang sesuai dalam pelaksanaan pelayanan pertimbangan teknis bagi staff yang membidangi pelayanan ini;

2. Tujuan jangka menengah dari aktualisasi ini adalah staff yang tegabung dalam tim pertimbangan teknis sudah paham dan menerapkan teknik penyelesaian pelayanan dengan tetap memperhatikan alur maupun ketentuan yang telah dibuat guna menghindari kelebihan target yang diterima per individu sehingga mengurangi keterlambatan penyelesaian pertimbangan teknis pertanahan.
3. Sedangkan tujuan jangka Panjang dari aktualisasi ini adalah system atau pengaturan tabel yang telah dibuat mengenai pengaturan waktu, jadwal, serta staff yang dibutuhkan dalam penyelesaian pelayanan pertimbangan teknis ini. Serta terciptanya nilai tambah bagi Kantor Pertanahan Kota Batam, dari sebelumnya belum ada tabel penyesuaian dalam pelaksanaan pertimbangan teknis pertanahan untuk pelaksanaan kegiatan agar tidak melebihi kapasitas staff yang tersedia sehingga menjadi lebih terkoordinasi dan terintegrasi.

No	Susunan Tim	Tugas	Kompetensi
1.	Kepala Kantor	Memantau jalannya tim perubahan	Mengendalikan Tim dibawahnya
2.	Kasubag TU	Ketersediaan sarana dan prasarana	Memahami pengelolaan anggaran
3.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Melaksanakan tahapan-tahapan dalam aksi perubahan	Memahami kegiatan dan alur kegiatan pelayanan di Seksi Penataan dan Pemberdayaan Mengendalikan pelayanan di seksi penataan dan pemberdayaan
4.	Anggota tim efektif yang terdiri dari jajaran staff di Seksi Penataan dan Pemberdayaan terdiri dari Koordinator PGT, Koordinator Landreform, Analis PGT dan staff PPNPN	Menjalankan rancangan aktualisasi perubahan	Mampu bekerjasama dalam tim

Tabel 2 : Tim Aksi Perubahan

Untuk menjadi sebuah tim yang efektif dibutuhkan adanya suatu standar yang dijadikan ukuran keberhasilan tim. Standar ukuran ini akan menjadikan dorongan bagi tim untuk berkinerja sesuai dengan standar yang ditentukan. Ketiadaan atau ketidakjelasan standar ukuran ini akan membuat tim tidak berkinerja dengan baik. Selain itu, dengan adanya standar yang tersajikan dengan jelas akan menjadi dorongan bagi anggota tim untuk mencapainya. Dalam aksi perubahan ini yang menjadi standar keberhasilan tim adalah.

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

3.1 Capaian Dalam Perbaikan System Pelayanan

a. Capaian Tahapan Inovasi

Capaian dalam tahapan kegiatan inovasi dibagi dalam tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

1) Persiapan

Konsultasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam selaku mentor dalam Aksi Perubahan yaitu dengan memohon arahan dan bimbingan . Dalam kesempatan ini Kasi Penataan dan pemberdayaan selaku pimpinan dalam aksi perubahan menjelaskan tentang isu yang diangkat dalam aksi perubahan yaitu terkait **“Optimalisasi Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan PKKPR Pada Kantor Pertanahan Kota Batam”**



2) Berdiskusi dengan bawahan dan rapat pembentukan tim efektif. Diskusi dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelayanan pertimbangan teknis dan mengemukakan beberapa inovasi yang dapat dilakukan.

Diskusi ini dilakukan bersama staff yang membidangi pelayanan pertimbangan teknis pertanahan, untuk saat ini permohonan pelayanan pertimbangan teknis masih melebihi target yang diberikan. Solusi untuk hal ini, ialah adanya penambahan 1 pegawai sebagai pendukung pertek. Saat ini, tabel untuk penyesuaian penyelesaian pertimbangan teknis telah sesuai dengan inovasi kasi penataan dan pemberdayaan dengan menentukan orang, jumlah pertek dan juga ketentuan hari turun lapang, sehingga permohonan pertek tidak berjalan lambat.



Adapun kendala yang dihadapi dalam pelayanan pertimbangan teknis pertanahan adalah:

1. kelebihan Target yang mana berdasarkan DIPA hanya 10 pertimbangan teknis, akan tetapi hingga Juli 2023 permohonan pertimbangan teknis yang masuk melebihi target DIPA yang diberikan perbulannya;
2. Terbatasnya SDM khusus yang menangani pelayanan pertimbangan teknis . Saat ini hanya terdapat 3 pegawai yang terdiri dari 3 orang (1 PNS 2 PPNPN);

2) Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini dilakukan pembentukan tim efektif untuk melaksanakan aksi perubahan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan waktu yang telah ditetapkan. Supaya tim efektif bisa berjalan maka dilakukan penyusunan tim efektif dan pembagian tugas dalam tim. Pada tahap ini juga dilakukan diskusi bersama anggota tim pertimbangan teknis.

No	Susunan Tim Efektif	Tugas
1.	Kepala Kantor	Selaku Mentor, pengarah dan pembimbing dalam aksi perubahan
2.	Kepala Seksi Pentaan dan Pemberdayaan	- Project leader dalam aksi perubahan - Selaku pengawas dalam aksi perubahan
3.	Anggota	- Mempersiapkan pelaksanaan aksi perubahan - Menjalankan aksi perubahan

Tabel 3 : Tim Efektif Pertimbangan Teknis

3) Evaluasi

Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap untuk melihat progress terhadap implementasi aksi perubahan dalam pelayanan pertimbangan teknis. Evaluasi ini dilakukan mulai dari tahap awal pengajuan pertimbangan teknis yaitu pengajuan permohonan ke loket pertanahan oleh pemohon, lalu diverifikasi oleh petugas loket yang juga merupakan

tim pertimbangan teknis, lalu dilakukan pengecekan kelengkapan dan kesesuaian berkas yang diajukan oleh pemohon. Apabila semua berkas lengkap, maka dapat dilakukan tahap selanjutnya yakni turun lapang, pengukuran dan pengolahan data. Evaluasi ini dilakukan 2kali dalam sebulan oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, dan hingga awal bulan Agustus 2023 ini pelaksanaan pertimbangan teknis sudah sesuai SOP dan metode yang digunakan juga sudah sesuai dengan inovasi aksi perubahan dalam optimalisasi pelayanan pertimbangan teknis pertanahan.

3.2 Manfaat Aksi Perubahan

Pelatihan kepemimpinan untuk pengawas memiliki manfaat yang signifikan bagi organisasi dan pengawas yang mengikutinya. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan manajemen pengawas, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengelola tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan kerja. Pelatihan ini juga dapat meningkatkan efektivitas di tempat kerja, karena pengawas akan memiliki keterampilan.

Manfaat penyusunan rancangan aksi Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Kegiatan PKKPR dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Manfaat Internal

- a) Memberikan dan mengembangkan kemampuan tim dan sumber daya manusia, khususnya SDM di Seksi Penataan dan Pemberdayaan dalam manajemen waktu, pengembangan ilmu dan etos kerja yang baik;
- b) Meningkatkan kinerja setiap sumber daya manusia di seksi penataan dan pemberdayaan;
- c) Menciptakan lingkungan dan sistem kerja yang baik di seksi penataan dan pemberdayaan;
- d) Memberikan Nilai pelayanan pertimbangan teknis yang baik di Kantor Pertanahan Kota Batam.

2. Manfaat External

- a) Peningkatan kualitas pelayanan: Pelayanan pertimbangan teknis yang sesuai dengan SOP dan dapat memberikan kepuasan kepada pemohon;
- b) Peningkatan produktivitas: Pemohon memiliki kepercayaan kepada BPN dalam mengajukan pertimbangan teknis pertanahan.
- c) Meningkatkan citra yang baik masyarakat dan instansi kepada Kantor Pertanahan Kota Batam karena salah satu pelayanannya, yaitu Pertimbangan teknis pertanahan dikerjakan

dengan baik.

3.3 Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

No	Pihak Terdampak	Perubahan kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan (klasikal / non dklasikal)	Pelaksanaan	Dampak Pelaksanaan Akper
1.	Petugas pelaksana di Seksi penataan dan pemberdayaan dan Tim efektif pembuat aplikasi	Penyelesaian pelayanan pertimbangan teknis pertanahan dan layanan peta analisis penatagunaan tanah sesuai dengan SOP Kemampuan programing dan mengembangkan sistem	Diskusi, sharing, coaching	-Membaca peraturan-peraturan Mengadakan rapat, monitoring dan evaluasi -Menjelaskan mengenai aksi perubahan yang dilakukan	Bekerja sesuai dengan aturan dan SOP Mampu menganalisis dan memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan
3.	Pemohon	Dapat memanfaatkan aplikasi pertanahan yang telah tersedia di loket Kantor Pertanahan Kota Batam	sosialisasi	Sosialisasi melalui media social kantor, membuat brosur dan tatap muka secara langsung kepada pemohon yang datang ke kantor	Aplikasi dapat digunakan oleh masyarakat / pemohon
4.	Seksi teknis terkait di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus yaitu	Menyampaikan secara online maupun offline terkait aksi perubahan dalam Optimalisasi Pelayanan	Rapat, diskusi dan sharing		Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dalam

	Tata Usaha, Seksi PHP dan Seksi survey dan Pemetaan	Pertimbangan Teknis			pertimbangan teknis
5.	Dinas CKTR Kota Batam	Menyampaikan secara online maupun offline terkait aksi perubahan dalam Optimalisasi Pelayanan Pertimbangan Teknis	Koordinasi, Rapat dan diskusi	Penyampaikan secara offline maupun online	Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dalam pertimbangan teknis

Tabel 4 : Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

BAB IV

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

4.1 Pemanfaatan Mata Pelatihan Pilihan Dalam Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan

a. Pelatihan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Negara atau bahkan setiap orang tidak berhak mencabut hak yang melekat pada manusia tersebut.

Hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum, begitu juga upaya dalam menghormati melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama oleh setiap warga Negara.

Adapun keterkaitan HAM dengan aksi perubahan ini diantaranya dengan mempelajari HAM maka dapat saling menghargai sesama manusia dan tidak berlaku sewenang-wenang bahkan terhadap orang yang tidak memiliki kedudukan karena pada hakikatnya semua orang memiliki HAM. Dalam kegiatan perencanaan haruslah berwawasan HAM, dalam artian perencanaan yang menjadikan nilai-nilai HAM sebagai rambu-rambu dalam baik perencanaan kegiatan maupun anggaran dan pelaksanaan implementasi di lingkungan kerja. HAM harus dipatuhi oleh Negara atau Pemerintah dalam menjalankan misinya sehingga tidak menjadikan perencanaan yang memihak salah satu golongan atau kelompok sebagai tujuan dengan mengorbankan manusia lainnya. Sejalan dengan nilai-nilai HAM adalah model humanis partisipatoris, yaitu memberi perhatian pada aspek dan dimensi manusiawi sebagai tujuan utama pembangunan yang memberi akses kepada warga Negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan.

b. Manajemen Pemerintahan

Pemanfaatan mata pelatihan Manajemen Pemerintahan dalam mendukung kegiatan aksi optimalisasi sistem pelayanan pertimbangan teknis pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Batam meliputi beberapa hal diantara, dengan menerapkan manajemen pemetintahan kita dapat melakukan Perencanaan pembangunan sistem yang baik,

Pengorganisasian yang efektif, dan Penggunaan sumber daya yang efisien. Dengan menerapkan materi Manajemen Pemerintahan kita dapat melaksanakan perencanaan yang baik meliputi penyusunan tujuan, strategi, dan program kerja. Dengan memiliki perencanaan yang baik, Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Batam dapat merumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan sistem pelayanan pendaftaran pertimbangan teknis pertanahan dan peta analisis penatagunaan tanah.

Manajemen pemerintahan dalam penerapannya bisa melakukan Pengorganisasian yang efektif. Pengorganisasian sumber daya pemerintahan. Dalam konteks ini, Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Batam perlu mengorganisasi sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang ada agar dapat mendukung optimalisasi sistem pendaftaran pelayanan pertimbangan teknis pertanahan dan peta analisis penatagunaan tanah. Penggunaan sumber daya pemerintahan secara efisien. Dalam hal ini, Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Batam perlu mengelola sumber daya yang ada dengan baik, seperti mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja, mengalokasikan anggaran dengan bijak, dan memanfaatkan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan efisiensi sistem pelayanan pendaftaran pertimbangan teknis pertanahan dan peta analisis penatagunaan tanah.

c. Pelatihan Komunikasi dan Interaksi

Pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) ini salah satu tujuannya yaitu untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial pengawas, bahwa hasil akhir dari proses pelatihan ini yakni bagaimana seorang pemimpin memiliki kompetensi yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang Aparatur Sipil Negara yang dapat diamati, diukur dan dibebankan dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan untuk menyusun perencanaan serta mewujudkan sebuah rencana juga merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mempunyai visi dan misi kearah mana organisasi yang dipimpinnya akan dibawa. Seorang pemimpin yang baik akan mampu mewujudkan impian itu semua. Pada umumnya tidak ada rencana yang buruk, semua rencana yang telah disusun baik bagi organisasi, namun masalah yang sering terjadi adalah kita tidak cukup punya konsistensi untuk mewujudkan sebuah rencana. Sering sekali implementasi dari sebuah rencana jauh dari harapan yang diinginkan dan ujungnya rencana tinggal rencana dan pemimpin sibuk dengan hal-hal yang tidak strategis dan melupakan mimpi untuk mewujudkan organisasi ideal yang telah dicanangkan diawal.

Mata pelatihan ini mempunyai keterkaitan dengan agenda aksi perubahan yang penulis implementasikan, yaitu teknik komunikasi dan cara memberika informasi kepada pihak terkait dalam pelaksanaan aksi perubahan ini. Terdapat Teknik komunikasi ini berbagai macam yaitu ada teknik komunikasi verbal, teknik komunikasi non-verbal, dan komunikasi tertulis. Dalam pelaksanaan akper terkait pelayanan pertimbangan teknis di Kantor Pertanahan Kota Batam ini, penulis menggunakan ketiga bentuk komunikasi ini dengan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan. Dalam pelaksanaan sehari – hari lebih banyak menggunakan teknik komunikasi verbal seperti mengadakan rapat maupun diskusi dengan staff, tim pertimbangan teknis dan forum penataan ruang. Sedangkan teknik komunikasi bersifat non verbal ini, lebih mengarah kepada ekspresi wajah maupun pemberian isyarat dalam penyampaian informasi seperti menggunakan intonasi suara, gerakan tangan dan gaya berbicara dengan tujuan untuk menarik simpati pendengar terhadap informasi yang diberikan agar tersampaikan dengan tepat.

BAB V

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

5.1 Penerapan Strategi Komunikasi

Implementasi aksi perubahan ini disampaikan secara langsung melalui diskusi maupun rapat dengan tim pertimbangan teknis yang disampaikan dalam forum penataan ruang Kota Batam pada Kantor Pertanahan Kota Batam, dan untuk hasilnya akhir dari pelayanan pertimbangan teknis ini dapat diakses oleh pemohon (masyarakat) melalui aplikasi OSS sehingga bersifat transparansi informasi. Strategi komunikasi yang dibangun dapat melalui agenda rapat dan diskusi dalam Forum Penataan Ruang serta memanfaatkan media social seperti WA Group. Untuk komunikasi *stakeholder* di dalam Kantor Pertanahan melalui rapat dan diskusi panitia pertimbangan teknis. Strategi komunikasi yang dibangun melalui agenda rapat dan diskusi dalam Forum Penataan Ruang serta memanfaatkan media sosial seperti WA Group. Untuk komunikasi *stakeholder* di dalam Kantor Pertanahan melalui rapat dan diskusi panitia pertimbangan teknis.



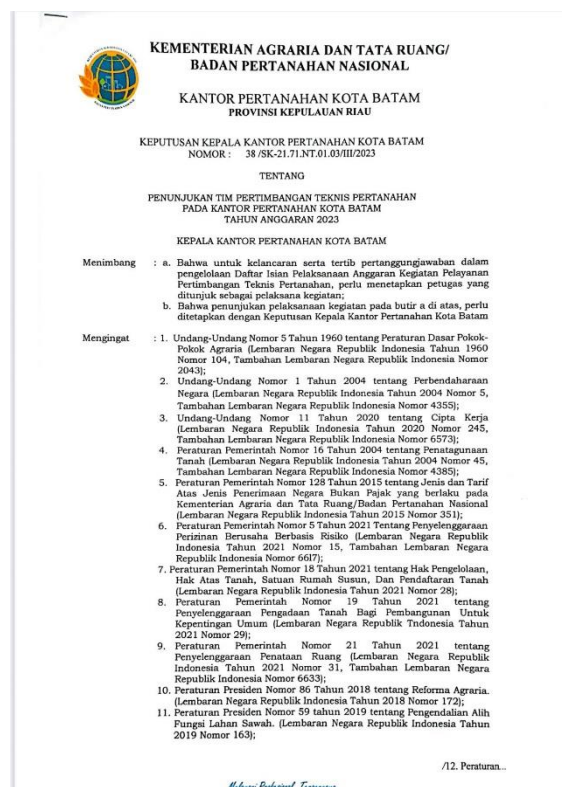
5.2 Keberhasilan Mendapat Dukungan adopsi / replikasi aksi perubahan

a. Dukungan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam selaku mentor

Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam memiliki peran penting dalam implementasi aksi perubahan terkait optimalisasi pelayanan pertimbangan teknis pertanahan, karena melalui diskusi bersama mentor dapat memberikan masukan dan arahan terhadap pelaksanaan aksi perubahan ini.

b. Dukungan dari Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Forum Penata Ruang Kota Batam

Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2021. Disebutkan bahwa Kantor Pertanahan wajib membuat Surat Keputusan Tim Pertimbangan Teknis guna memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan peraturan yang ada. SK Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan terdiri dari Kepala Kantor, Seksi Pengukuran dan Pemetaan, Seksi Pendaftaran Hak, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, dan Seksi Sengketa. Sinergi dibutuhkan dalam menciptakan produk pelayanan yang baik dan sebagaimana mestinya.



Tugas Forum Penataan ruang dalam pemanfaatan ruang adalah :

- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten/kota dalam hal diperlukan;
- b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
- c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
- d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
- e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada bupati atau wali kota.



BAB VI

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

6.1 Perencanaan Keberlanjutan Inovasi

Aksi perubahan terkait optimalisasi pelayanan pertimbangan teknis pertanahan, memiliki manfaat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yaitu:

- a. Tujuan dari jangka pendek : yaitu terciptanya alur yang sesuai dalam pelaksanaan pelayanan pertimbangan teknis bagi staff yang membidangi pelayanan ini:
- b. Tujuan jangka menengah dari aktualisasi ini adalah staff yang tergabung dalam tim pertimbangan teknis sudah paham dan menerapkan teknik penyelesaian pelayanan dengan tetap memperhatikan alur maupun ketentuan yang telah dibuat guna menghindari kelebihan target yang diterima per individu sehingga mengurangi keterlambatan penyelesaian pertimbangan teknis pertanahan;
- c. Sedangkan tujuan jangka Panjang dari aktualisasi ini adalah system atau pengaturan tabel yang telah dibuat mengenai pengaturan waktu, jadwal, serta staff yang dibutuhkan dalam penyelesaian pelayanan pertimbangan teknis ini. Serta terciptanya nilai tambah bagi Kantor Pertanahan Kota Batam, dari sebelumnya belum ada tabel penyesuaian dalam pelaksanaan pertimbangan teknis pertanahan untuk pelaksanaan kegiatan agar tidak melebihi kapasitas staff yang tersedia sehingga menjadi lebih terkoordinasi dan terintegrasi.

Pelaksanaan dalam Peningkatan Mutu dan pengembangan kualitas SDM ang tergabung dalam Tim Pertimbangan Tekni pada Kantor Pertanahan Kota Batam

- a. **Pendidikan:** Salah satu terobosan yang dapat dilakukan dalam pendidikan adalah mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Dalam penyusunan PTP, perlu mengajak setiap tim untuk aktif terkait mengikuti pelatihan dan *webinar* terkait PTP;
- b. **Pelatihan:** Inovasi dapat dilakukan dalam pelatihan dengan mengadopsi model pelatihan yang lebih interaktif dan terintegrasi. Selain itu, pelatihan juga dapat dilakukan secara *online* atau virtual, sehingga dapat diakses oleh lebih banyak orang. Pelatihan yang

menunjang dalam kegiatan PTP adalah pelatihan *Arcgis* dan penerbangan *Drone* untuk turun lapang.

- c. **Kebijakan:** Terobosan dapat dilakukan dalam kebijakan dengan mengembangkan kebijakan yang mendukung pengembangan kualitas SDM, seperti kebijakan menjadikan kegiatan PTP sebagai kegiatan pokok dan utama;
- d. **Teknologi:** Inovasi dalam teknologi juga dapat membantu pengembangan kualitas SDM. Contohnya, penggunaan teknologi dalam kegiatan PTP, seperti penggunaan *Drone* dan komputer yang mumpuni;
- e. **Pengukuran Kinerja:** Inovasi dalam pengukuran kinerja dapat membantu instansi dalam mengidentifikasi petugas yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengukuran kinerja juga dapat dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa karyawan terus berkembang dan meningkatkan kualitasnya;
- f. **Budaya Organisasi:** Terobosan dalam budaya organisasi dapat membantu meningkatkan motivasi petugas untuk belajar dan berkembang.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Identifikasi pengembangan potensi diri dalam aksi perubahan merupakan proses untuk mengenali dan memahami kemampuan, keterampilan, dan potensi yang dimiliki individu dalam menghadapi perubahan. Hal ini melibatkan refleksi diri dan evaluasi untuk menentukan area di mana seseorang dapat mengembangkan diri dan meningkatkan kapabilitas mereka dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Proses identifikasi dimulai dengan penilaian diri

yang jujur tentang kekuatan dan kelemahan yang ada. Ini melibatkan mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang relevan yang diperlukan dalam situasi perubahan, serta melihat ke dalam sikap dan sifat pribadi yang mungkin mempengaruhi respons terhadap perubahan. Dalam konteks perubahan, kemampuan untuk beradaptasi, fleksibilitas, dan kemauan untuk belajar dan berkembang menjadi faktor penting dalam mengidentifikasi potensi pengembangan diri.

Setelah mengidentifikasi potensi pengembangan diri, langkah selanjutnya adalah merancang dan melaksanakan tindakan pengembangan yang tepat. Ini dapat melibatkan berbagai pendekatan, seperti pelatihan dan pengembangan, membentuk jaringan dukungan, mencari mentor, atau mengambil tanggung jawab baru yang menantang. Individu dapat mencari peluang untuk memperoleh pengetahuan baru, mengasah keterampilan yang dibutuhkan, atau mengembangkan atribut kepemimpinan yang relevan. Mereka juga dapat mencari pengalaman praktis dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang berhubungan dengan perubahan.

Identifikasi pengembangan potensi diri dalam aksi perubahan penting karena membantu individu untuk mengoptimalkan kemampuan mereka dan meraih kesuksesan dalam menghadapi perubahan. Dengan meningkatkan kompetensi dan memperluas kapabilitas pribadi, individu dapat menjadi lebih siap dan responsif terhadap perubahan, mengatasi tantangan dengan lebih baik, dan bahkan mengambil peran yang lebih proaktif dalam mempengaruhi dan memimpin perubahan.

Berikut Hasil Identifikasi Pengembangan Potensi Diri Dalam Aksi Perubahan dengan kriteria dan penilaian tertentu

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta : Amdani, S.H., M.Kn
NIP : 197104021994031002
Jabatan : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
Instansi : Kantor Pertanahan Kota Batam
Program : PKP 2023
Nama Mentor : Dani Prasetyo, S.E., M.M
NIP : 197601101998031002
Jabatan : Kepala Kantor
Instansi : Kantor Pertanahan Kota Batam

	Nilai Komponen			Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan		
Peserta	8,33	8,00	8,00	8,11	Baik
Mentor	8,83	8,20	8,20	8,41	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,68	8,14	8,14	8,32	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9-10 Istimewa
 7-8.99 Baik
 5-6.99 Cukup
 3-4.99 Kurang
 1-2.99 Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku	8,32
Kualifikasi:	Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama : Amdani, S.H., M.Kn
NIP : 197104021994031000
Jabatan : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
Instansi : Kantor Pertanahan Kota Batam
Program : PKP 2023
Nama Mentor : Dani Prasetyo, S.E., M.M
NIP : 197601101998031000
Jabatan : Kepala Kantor
Instansi : Kantor Pertanahan Kota Batam

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	9	8,70	Baik
	Komitmen	8	9	8,70	Baik
	Kedisiplinan	9	9	9,00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9,00	Istimewa
	Konsistensi	8	9	8,70	Baik
	Pengambilan Keputusan	8	9	8,70	Baik
	Rata-Rata		8,33	9,00	8,80
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	8	8,00	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	8	8,00	Baik
	Komunikasi	8	8	8,00	Baik
	Fleksibilitas	8	8	8,00	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	8	8,00	Baik
	Rata-Rata		8,00	8,00	8,00
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	8	7	7,30	Baik
	Adaptabilitas	8	7	7,30	Baik
	Pengembangan orang lain	8	7	7,30	Baik
	Orientasi pada hasil	8	8	8,00	Baik
	Inisiatif	8	8	8,00	Baik
	Rata-Rata		8,00	7,40	7,58
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,11	8,13	8,13	Baik

Keterangan Kualifikasi

9-10 Istimewa
 7-8.99 Baik
 5-6.99 Cukup
 3-4.99 Kurang
 1-2.99 Sangat Kurang

Rancangan potensi pengembangan diri peserta meliputi:

- **Komponen Integritas**
 - a. Konsistensi
 - b. Pengambilan keputusan
- **Komponen kerja sama**
 - a. Kerjasama internal dengan rencana pengembangan diri membangun komunikasi efektif di semua level, baik internal maupun eksternal unit kerja sehingga tercapai sinergi antar sumberdaya yang ada
 - b. Kerjasama eksternal dengan rencana pengembangan diri terus menerus membangun kerjasama dan aliansi dengan pihak eksternal dalam kerangka memperkaya informasi yang disampaikan serta kualitas layanan yang diberikan



Rancangan Potensi Pengembangan Diri Peserta dapat meliputi:

No.	Komponen Perilaku Kepemimpinan	Sub Komponen yang perlu dikembangkan	Rencana Pengembangan Potensi Diri		Pelaksanaan
			Individu	Penugasan	
1	Integritas	Mengingatkan rekan kerja betapa pentingnya pelayanan di pemerintahan, khususnya pelayanan PTP	Individu melakukan belajar mandiri dan mencari referensi yang cukup terkait pelayanan PTP	Memberikan bahan bacaan terkait pentingnya pelayanan PTP dan kaitannya dengan hal lain	Sharing lewat media komunikasi dan diskusi
		Memahami kode etik dan SOP terkait pelayanan PTP	Individu melakukan belajar mandiri dan mencari referensi yang cukup terkait pelayanan PTP	Memberikan aturan dan berita yang up to date terkait pelayanan PTP	Sharing lewat media komunikasi dan diskusi
2	Kerjasama	Membuat jadwal rutin terkait diskusi antara tim PTP	Membuat jadwal dan agenda pertemuan	Memberikan penugasan terkait materi diskusi yang akan dibahas	Diskusi dan Foto Kegiatan
		Meningkatkan sistem kerjasama antara BPN dan Mitra Kerja PKKPR	Membuat sistem web yang mendukung kerjasama	Menugaskan Tim PTP untuk menginventarisasi dokumen PTP berbasis digital	Sharing lewat media komunikasi dan diskusi
3	Mengelola Perubahan	Memastikan perubahan berdampak baik kelancaran pelayanan PTP	Membuat tabel kendali pelayanan PTP	Memberikan penugasan untuk Tim PTP mengupdate laporan di tabel kendali	Sharing lewat media komunikasi dan diskusi
		Menjaga konsistensi perubahan yang telah dilaksanakan agar pada koridornya	Monitoring dan Evaluasi perubahan dan menganalisisnya	Memberikan laporan terkait masalah dan solusi pelayanan PTP	Sharing lewat media komunikasi dan diskusi

Dari rekapitulasi nilai gabungan di atas, yang menjadi fokus untuk dilaksanakan pengembangan potensi diri berdasarkan kesepakatan dengan mentor adalah pada komponen Integritas, Kerja Sama dan Mengelola Perubahan. Integritas, kerjasama, dan kemampuan mengelola perubahan memainkan peran penting dalam pengembangan potensi diri. Pertama, integritas adalah nilai fundamental yang melibatkan keselarasan antara kata dan tindakan, menjaga kejujuran, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang teguh. Dengan memiliki integritas, seseorang menciptakan dasar yang kuat untuk membangun kepercayaan diri dan hubungan yang sehat dengan orang lain. Kedua, kerjasama memungkinkan individu untuk belajar dari orang lain, berbagi ide, dan memperluas pemahaman mereka melalui kolaborasi. Dalam pengembangan potensi diri, kerjasama dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda dapat memberikan perspektif baru, dukungan, dan umpan balik yang berharga. Terakhir, kemampuan untuk mengelola perubahan menjadi penting karena pengembangan diri seringkali melibatkan perubahan dalam pola pikir, kebiasaan, dan lingkungan. Mampu mengelola perubahan dengan fleksibilitas, ketahanan, dan adaptabilitas membantu individu mengatasi hambatan, menjaga motivasi, dan memanfaatkan peluang baru yang muncul dalam proses pengembangan potensi diri. Secara keseluruhan, integritas, kerjasama, dan kemampuan mengelola perubahan merupakan pilar yang penting dalam mencapai perkembangan pribadi yang holistik dan berkelanjutan.

Dalam tabel diatas dapat dikatakan bahwa, pengembangan potensi diri mulai integritas sudah diterapkan dengan baik dalam pelaksanaan pertimbangan teknis, yang mana setiap ti yang tergabung dalam tim pertimbangan teknis memahami SOP dan kode etik pelayanan pertimbangan teknis. Saat ini, tim pertek diarahkan untuk selalu belajar mandiri terkait pelayanan pertimbangan teknis pertanahan, karena Peraturan Perundang – Undangan terkait Pertimbangan teknis dapat berubah sesuai dengan arahan dan kebijakan Pemerintah.

Terkait kerjasama dalam penyelesaian pertimbangan teknis saat ini, sudah berjalan dengan baik dimana adanya jadwal untuk diskusi maupun rapat bersama Dinas terkait yang tergabung dalam Forum Penataa Ruang, biasanya setiap awal bulan dilakukan rapat bersama untuk mengevaluasi pelayanan pertimbangan teknis di Kota Batam. Agar pelayanan pertimbangan teknis berjalan lancar, dapat digunakan beberapa aplikasi teknologi maupun sarana prasarana yang bersifat digital, dengan tujuan mempermudah dan mempercepat kinerja tim dalam pelaksanaan pertimbangan teknis. Untuk saat ini menggunakan sarana

berupa drone, dan beberapa aplikasi seperti penggunaan Aplikasi Spreadsheet dalam Pembuatan Lembar Kendali, Penggunaan Cloud Storage dalam Inventarisasi Dokumen PTP dan Penggunaan Email dalam Komunikasi Dokumen PTP antar Instansi.

Dokumentasi saat Menentukan Jadwal untuk Turun Lapang Pertimbangan Teknis bersama tim pertimbangan teknis, dan melalui diskusi ini ditentukan bahwa untuk kegiatan turun lapang dilakukan di hari jumat dan pelaksanaan pengerjaan pertek studio dilaksanakan pada hari senin sampai kamis. Dalam pelaksanaan pertimbangan teknis juga diperlukan kerja sama antara BPN Kantor Pertanahan Kota Batam dengan instansi lain seperti Dinas CKTR Kota Batam, Dinas PTS. Dalam hal ini dinas CKTR juga bertugas untuk turun lapang bersama BPN dan dinas PTSP melakukan inventarisasi dokumen Pertimbangan teknis melalui aplikasi digital.

Dokumentasi dalam menentukan jadwal turun lapang pertimbangan teknis dan diskusi bersama Tim Pertimbangan Teknis

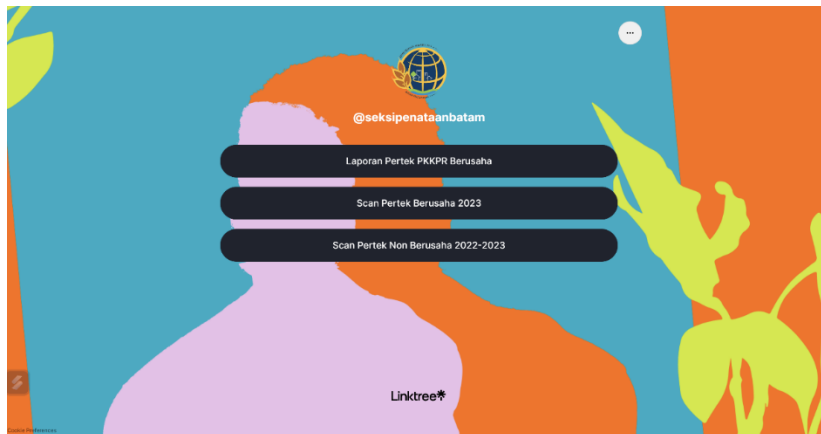


Berikut beberapa aplikasi yang digunakan dalam Pelayanan Pertimbangan Teknis di Kantor Pertanahan Kota Batam

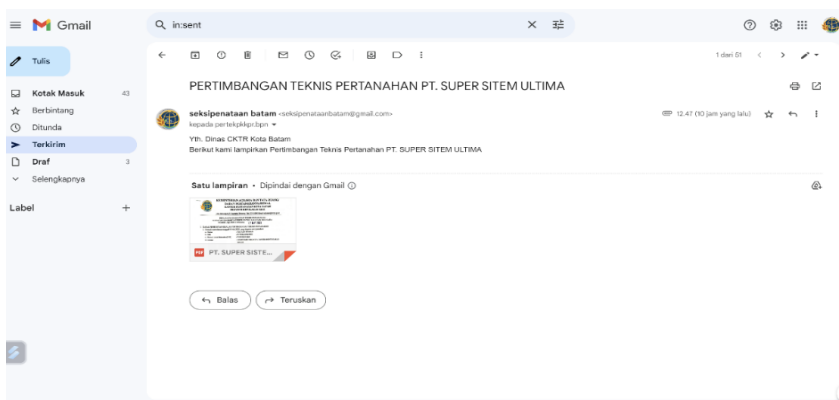
1. Pengguna Aplikasi Spreadsheet dalam Pembuatan Lembar Kendali

No	Tanggal Masuk	Nomor Berkas	Nama Pemohon	Nama PT	Jenis Pemohonan	Status Berkas	PIC	Keterangan
1	19/05/2023	12345 ABCD	PT EFGH		PTP-PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha	Belum Terasa Lanang	Khusnul	Menentukan Jadwal Turun Lapangan
2	19/05/2023	6789 HIJK	PT XYZ		PTP-PKKPR Untuk Kegiatan Non Ba...	Proses Berkas	Tommy	Pembuatan Peta
3	19/05/2023							
4	19/05/2023							
5	19/05/2023							
6	19/05/2023							
7	19/05/2023							
8	19/05/2023							
9	19/05/2023							
10	19/05/2023							
11	19/05/2023							
12	19/05/2023							
13	19/05/2023							
14	19/05/2023							
15	19/05/2023							
16	19/05/2023							
17	19/05/2023							
18	19/05/2023							
19	19/05/2023							
20	19/05/2023							
21	19/05/2023							
22	19/05/2023							
23								

2. Penggunaan Cloud Storage dalam Inventarisasi Dokumen PTP



3. Penggunaan Email dalam Komunikasi Dokumen PTP antar Instansi



BAB VIII

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari Laporan Aksi Perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Batam dalam pelayanan pertimbangan teknis pertanahan adalah kuota permohonan pertimbangan teknis yang masuk melebihi kapasitas dengan keersediaan staff yang ada, sehingga alur penyelesaian permohonan berjalan lambat;
2. Implementasi aksi perubahan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) minggu mulai dari 2 Juni a.d 4 Agustus 2023 melalui 4 (empat) tahapan, yaitu Persiapan, Pengumpulan Bahan dan implementasi aksi perubahan pada pelayanan pertimbangan teknis pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Batam;
3. Aksi perubahan ini dapat menghasilkan keteraturan dalam penyelesaian pelayanan pertimbangan teknis pertanahan, mulai dari penyusunan jadwal terhadap pembagian staff yang menangani pertimbangan teknis setiap harinya, pembuatan jadwal turun lapang, pembuatan jadwal untuk membuat hasil maupun laporan dari tutun lapang dan proses akhir penyelesaian pertimbangan teknis pertanahan.

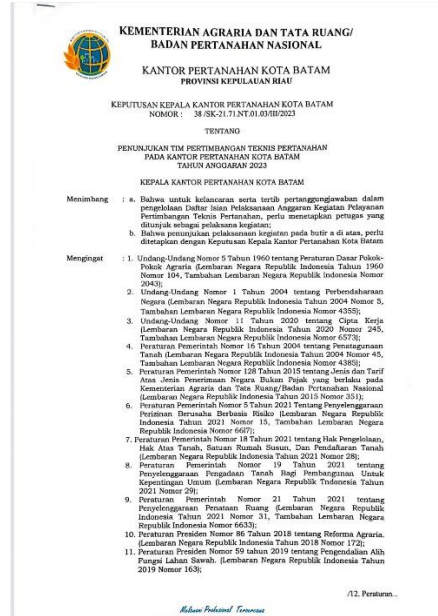
5.2 Rekomendasi dan Rencana Kegiatan Target Jangka Panjang

Inovasi yang dilaksanakan pada aksi perubahan ini menghasilkan output yang bersifat jangka panjang, sehingga perlu ditindaklanjuti agar dapat selalu diterapkan dalam penyelesaian pertimbangan teknis pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Batam. Rencana kegiatan untuk target jangka panjang dalam penerapan aksi perubahan dalam optimalisasi pelayanan pertimbangan teknis pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Batam yakni optimalisasi dalam pengaturan waktu, jadwal, serta staff yang dibutuhkan dalam penyelesaian pelayanan pertimbangan teknis ini. Serta terciptanya nilai tambah bagi Kantor Pertanahan Kota Batam, dari sebelumnya belum ada tabel penyesuaian dalam pelaksanaan pertimbangan teknis pertanahan untuk pelaksanaan kegiatan agar tidak melebihi kapasitas staff yang tersedia sehingga menjadi lebih terkoordinasi dan terintegrasi

BAB IX

LAMPIRAN

a. SK Tim Pertimbangan Teknis



b. Rapat Internal Bersama Tim Pertimbangan Teknis



c. Diskusi Bersama Forum Penataan Ruang Kota Batam



d. Turun Lapang Untuk Permohonan Pertimbangan Teknis Berusaha



e. Diskusi Bersama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Terkait Kerjasama Dalam Pelayanan Pertimbangan Teknis Kota Batam



f. Monitoring Implementasi Pelayanan Pertimbangan Teknis Pada Loker Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Batam

